

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Structural Adjustment Programs (SAPs) adalah serangkaian program yang diciptakan oleh IMF. Program ini dibuat untuk mengatasi dampak bencana ekonomi global pada tahun 1970an, seperti krisis minyak dan depresi ekonomi internasional yang berakibat pada stagnasi ekonomi negara-negara Dunia Ketiga (Towson, 2015). Selain itu SAPs juga diciptakan dalam rangka mengurangi ketidakseimbangan fiskal negara penerima bantuan yang umumnya merupakan negara dunia ketiga dengan cara membuat negara-negara tersebut menjadi lebih *market-oriented* dan berkonsentrasi pada perdagangan serta produksi, sehingga mampu meningkatkan ekonomi secara cepat (Greenberg, 1983 : 85-93).

Program dan kebijakan dari SAPs seluruhnya dibuat menyesuaikan keadaan dan kondisi negara peminjam, sehingga tiap negara memiliki aturan maupun kewajiban yang berbeda-beda. Kebijakan yang tertuang dalam SAPs merefleksikan ideologi neo-liberal yang hingga saat ini menggerakkan era globalisasi.

Kebijakan SAPs bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang diberbagai negara berkembang dengan melakukan rekonstruksi ekonomi dan mengurangi intervensi pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain berupa program-program (1) Swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan, (2) Deregulasi dan

pembukaan peluang bagi investor asing, (3) Pengurangan subsidi di berbagai sektor, (4) Stabilisasi makroekonomi, (5) Liberalisasi pasar, yang dengan demikian memperkuat pengurangan kemiskinan (Easterly, May 2001).

SAPs mulai diimplementasikan Zimbabwe pada tahun 1991, resmi setelah ditandatanganinya *Letter of Intent* IMF. Tidak seperti kebanyakan negara yang menerapkan SAPs, kerjasama yang dilakukan Zimbabwe dengan IMF merupakan upaya dalam melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi bukan sebagai respon terhadap krisis (Catherine Marquette dalam Watkin, April 1999).

Selama periode 1980-1990, perekonomian Zimbabwe tergolong perekonomian yang kuat. Sektor utama dan kedua di Zimbabwe sama-sama mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pada tahun 1990, rata-rata sebanyak 3,2% sektor manufaktur merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang kemudian diikuti oleh sektor pertanian dan industri hotel. Tingkat pertumbuhan tahunan riil selama periode ini berkisar antara 3-4%, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 7,6% tercatat pada tahun 1988. Sistem pertanian ganda pada saat itu turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebab sistem ini membentuk praktek pertanian yang lebih produktif dan efisien, sehingga pertanian mampu memberikan persediaan makanan dan bahan baku untuk kegiatan produksi masyarakat Zimbabwe di berbagai sektor.

Untuk menyokong pertumbuhan dan loncatan pertumbuhan ekonomi, maka selain mendapat kucuran dana sebanyak US\$ 484.000.000 dari IMF, Zimbabwe juga menerapkan program penyesuaian struktural ekonomi dari IMF. Adapun program-program tersebut antara lain:

1. Pengurangan defisit fiskal
 2. Pelembagaan kebijakan moneter yang prudent
 3. Liberalisasi kebijakan perdagangan dan sistem devisa
 4. Deregulasi
 5. Pembangunan jaringan pengaman sosial bagi kelompok rentan
- (Sichone, 2003)

Pada tahun 1998, sebagai tahap kedua dari usaha loncatan ekonomi pasca diterapkannya SAPs, pemerintah Zimbabwe meluncurkan program terusan penyesuaian struktural ekonomi berupa *Zimbabwe Programme for Economic and Social Transformation* (ZIMPREST). ZIMPREST merupakan serangkaian program reformasi makro-ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah hingga tahun 2000. SAPs pada saat itu kemudian untuk sementara digantikan oleh ZIMPREST. ZIMPREST ditujukan oleh pemerintah Zimbabwe untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua prestasi SAPs dengan cara yang lebih terkesan dilakukan oleh bangsa (Sichone, *Zimbabwe's Economic Policies 1980-2002*, 2003).

Direncanakan ZIMPREST mampu meningkatkan pertumbuhan riil tahunan GDP sebanyak 6 persen hingga tahun 2000 dan penciptaan 44.000 lapangan kerja baru setiap tahunnya. Untuk mencapai target tersebut, tabungan dan investasi negara diharapkan mampu mencapai setidaknya 23 persen dari GDP dan defisit anggaran dapat dikurangi menjadi dibawah 5 persen. Selain berusaha untuk memajukan pekerjaan yang belum selesai dari SAPs, dalam programnya ZIMPREST juga menambahkan tujuan sosial-politik seperti perbaikan kualitas lembaga-lembaga demokratis; mengusahakan pemerintahan yang baik; dan penghapusan korupsi. Namun, dalam kurun waktu yang singkat pada tahun 1998, negara mulai mengalami dampak dari perlambatan ekonomi dan kemudian masuk ke dalam resesi pada tahun 2000 (Sichone, *Zimbabwe's Economic Development Policies 1991-2001*, 2003).

Sejak tahun 1991 dolar Zimbabwe mengalami devaluasi berulang kali, terlebih setelah adanya proses restitusi tanah. Perekonomian kemudian dihancurkan hingga tingkat dimana negara tidak bisa lagi memenuhi neraca pembayaran atau menyediakan pelayanan sosial dasar. Liberalisasi ekonomi terbesar terjadi pada saat pencabutan proteksionisme. Hal ini kemudian membuka akses domestik terhadap barang impor dengan harga murah sehingga mengakibatkan penutupan dan penurunan drastis terhadap banyak industri padat karya. Sehingga berakibat pada munculnya

kemiskinan yang belum pernah terjadi sebelumnya (*Zimbabwe's in Crisis*, 2004).

Keputusan Afrika Selatan untuk memberlakukan tarif ekspor tekstil di Zimbabwe semakin memperburuk keadaan. Kekeringan yang parah di negeri ini secara signifikan mempengaruhi hasil pertanian, yang merupakan sumber utama pendapatan mata uang asing. Produktivitas manufaktur menurun sebanyak 11,9% dan sektor pertambangan sebesar 4% pada tahun 2001. Dengan demikian, antara tahun 1991 dan tahun 2001, GDP Zimbabwe menurun, hingga pada angka minus 11,5%. Demikian pula tingkat inflasi di negara ini berjalan pada angka ganda. Pada tahun 2001 misalnya, tingkat inflasi naik menjadi lebih dari 100 persen (Sichone, *Zimbabwe's Economic Development Policies 1991-2001*, 2003).

Studi Pengkajian Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Zimbabwe pada tahun 1995 menunjukkan bahwa 62 persen penduduk Zimbabwe hidup dalam kemiskinan. Menurut laporan tersebut, 42 persen masyarakat Zimbabwe berada di bawah garis kemiskinan makan, dan 62 persen dari masyarakat Zimbabwe pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, laporan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan umumnya terjadi lebih tinggi di daerah pedesaan, di mana 72 persen penduduknya memiliki pendapatan dibawah total garis

kemiskinan konsumsi jika dibandingkan dengan 46 persen di daerah perkotaan (Sichone, *Increased Poverty*, 2003).

Sebenarnya program-program penopang pertumbuhan ekonomi dan program sebagai respon terhadap krisis ekonomi tertuang dalam program 5 tahun ESAPs (*Economy Structural Adjustment Programmes*). Namun sayangnya hingga saat ini ESAPs belum mampu menopang pertumbuhan ekonomi di Zimbabwe secara signifikan. Meskipun mengalami kenaikan pada beberapa sektor, namun pencapaian tersebut masih terbilang jauh dari target yang dijanjikan oleh IMF.

Menurut laporan *Zimbabwe's Economic Development Policies* tahun 1991-2001, kebijakan yang ditawarkan ESAPs dalam menghadapi krisis ekonomi di Zimbabwe antara lain berupa:

1. Penghapusan kontrol terhadap harga
2. Penghapusan kontrol terhadap upah
3. Pengurangan belanja pemerintah
4. Meningkatkan keuntungan transaksi luar negeri
5. Melakukan restrukturisasi di berbagai parastatal dan perusahaan secara radikal (Sichone, 2003).

Hingga pada tahun 2015 terhitung sudah empat kali Zimbabwe menandatangani *Letter Of Intent* IMF, yang berarti sudah empat kali pula Zimbabwe menerima dana bantuan ekonomi maupun kebijakan yang tertuang dalam SAPs (IMF, 2015). Van de Walle (2001) berpendapat

bahwa tidak terdapat perbedaan antara tingkat bantuan yang masuk ke negara-negara yang telah mengikuti nasihat reformasi struktural internasional dengan negara-negara yang tidak. Fenomena negara-negara berkinerja buruk kembali ke bantuan yang sama berkali-kali terus ditemukan. Kadang sebagai penerus restrukturisasi utang dan kadang sebagai penerus peringanan utang (Fukuyama, 2004 : 45).

Hyperinflasi yang terjadi di Zimbabwe pada tahun 2008 semakin menegaskan akan buruknya permasalahan ekonomi di Zimbabwe. Selain itu masalah ekonomi berkepanjangan pasca masuknya SAPs di Zimbabwe seolah menghilangkan identitas dan fungsi SAPs itu sendiri. Dari permasalahan ekonomi tersebut kemudian muncul permasalahan-permasalahan baru, yakni permasalahan sosial dan politik yang tidak kalah serius seperti masalah pada pemerintahan yang korup, munculnya gerakan ekstrimis ataupun terroris, serta rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan.

Meskipun pada tahun 1991 pemerintah Zimbabwe setuju untuk menerapkan SAPs oleh IMF, pemerintahan di Zimbabwe setelahnya justru malah menggrogoti reformasi ekonomi mereka sendiri. Hal ini ditandai dengan adanya dominasi pemerintah terhadap ekonomi, selain itu pemerintah juga melakukan penjagaan atas peluang bagi pengayaan diri dan patronase. Daripada mengurangi pengeluaran militer dan patronase, pemerintah lebih memilih untuk memotong pengeluaran subsidi untuk pendidikan dan kesehatan. Hal ini menyebabkan orang miskin di

Zimbabwe tidak dapat mengakses fasilitas pokok dari negaranya. Inflasi yang tinggi semakin memperparah tingginya biaya hidup dan penurunan upah riil.

Penurunan ekonomi diperburuk oleh kerusakan aturan hukum, seperti yang ditunjukkan oleh pendudukan militan ZANU-PF berupa okupasi pertanian komersial milik ras kulit putih dengan memberikan empat miliar dolar kepada para mantan kombatan dalam bentuk gratifikasi dan intervensi militer di Republik Demokratik Kongo yang menyebabkan semakin bengkaknya pengeluaran negara (*Impact of Economic Structural Adjustment Policies: Macro-economic Crises*, 1991).

Krisis di Zimbabwe pada dasarnya diawali oleh krisis yang terjadi pada dinamika politik dalam negeri. Krisis politik ini berupa keadaan politik yang tidak menentu, dimana keadaan tersebut berbahaya baik bagi negara maupun aktor didalamnya. Krisis politik merupakan akibat dari lembaga politik yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Krisis politik biasanya ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap politik, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berlangsung, demonstrasi atas kebijakan pemerintah secara terus menerus, pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada, hingga yang terparah berupa timbulnya upaya penggulingan pemerintahan atau kudeta terhadap pemerintahan yang berlangsung. Krisis politik juga muncul sebagai akibat pembuatan dan penerapan kebijakan yang tidak efektif, selain itu tuntutan

juga berpengaruh terhadap tingkat bunga yang lebih tinggi atas pinjaman masyarakat. Namun krisis politik utamanya didorong oleh degradasi atau kemunduran sosial, kelembagaan, dan politik di suatu negara (Chang, 2005).

Krisis politik di Zimbabwe dapat ditelusuri semenjak peristiwa pemisahan diri kelompok oposisi dari partai dominan yang berkuasa pada masa pemerintahan Robert Mugabe yakni *The Zimbabwe African Nation Union – Patriotic Front* (ZANU-PF) menjadi *Movement for Democratic Change* (MDC) yang dipimpin oleh Morgan Tsvangirai pada tahun 1980. Selain itu, hilangnya referendum konstitusi milik ZANU-PF dan Presiden Robert Mugabe pada Februari tahun 2000 menyebabkan terjadinya kebuntuan politik, meningkatnya represi negara, dan kekerasan politik (Cawthra, 2010).

Partai Zanu PF dibawah kepemimpinan pejuang kemerdekaan Robert Mugabe, telah berkuasa sejak pemilu pertama Zimbabwe pada tahun 1980. Zanu PF dan Mugabe bersikeras untuk tetap memiliki cengkeraman politik meskipun terjadi penentangan terhadap pemerintahan mereka. Untuk memadamkan kekuatan oposisi terhadap kekuasaannya, Mugabe kemudian melakukan yang namanya represi negara (pemerintah tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah), kekerasan politik, peningkatkan korupsi dan kebrutalan didalam negeri. Dimana tindakan tersebut berakibat pada kebuntuan politik, pelanggaran HAM,

krisis kepercayaan, demonstrasi, kerusuhan, dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada (*Zimbabwe in Crisis*, 2004).

Korupsi resmi menjadi terang-terangan dan tidak ada langkah-langkah perbaikan. Manajemen partai ZANU-PF yang korup dan tidak efisien oleh Mayor Solomon Tawengwa, membangkitkan tumbuhnya ketidakpuasan atas pemerintahan yang ada. Pada akhir 1990-an, penurunan ekonomi di Zimbabwe sudah sangat mengkhawatirkan. GDP turun 2 dan 3 persen di masing-masing tahun 1998 dan 1999 dan sebesar 6 persen pada tahun 2000. Meskipun pemerintah sudah menekan angka pengeluaran negara, akan tetapi defisit anggaran tahun 2001 mencapai angka 20 persen dari GDP. Korupsi dan manajemen yang buruk secara bertahap telah mematikan perekonomian di Zimbabwe (ICG, 2001).

Sebagai akibat dari ketegangan politik yang meningkat, negara mencapai kebuntuan politik. Respon pemerintah terhadap krisis pun telah mati. Pemerintah memberlakukan langkah-langkah pengendalian harga yang sebenarnya menciptakan ilusi bahwa situasi telah terkendali. Padahal keadaan tersebut justru malah menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi berkembangnya pasar gelap.

Krisis politik yang terjadi berakibat pada hilangnya fungsi negara di Zimbabwe. Menurut Miriam Budiarjo (dalam Priyanto, 2008), setiap negara harus menyelenggarakan empat fungsi minimal yang mutlak diperlukan, yakni:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
3. Fungsi pertahanan, yaitu menjaga kemungkinan serangan baik dari luar negeri maupun dalam negeri
4. Fungsi menegakkan keadilan yang dilakukan melalui badan-badan pengadilan.

Menurut Lucian Pye dalam “*Aspect of Political Development: The Concept of Political Development*” untuk mencapai pembangunan ekonomi, suatu negara perlu melakukan yang namanya pembangunan politik. Menurutnya pembangunan politik memiliki 3 sifat mendasar yang harus dipenuhi suatu negara, tiga sifat mendasar tersebut antara lain:

1. Persamaan (*equality*): kesetaraan berarti hukum yang diterapkan harus bersifat universal, berlaku untuk semua dan dilakukan secara adil. Selain itu kesetaraan juga berarti perekrutan pejabat politik harus mencerminkan standar pencapaian kinerja bukan pada hasil pertimbangan dari sistem sosial tradisional seperti kepercayaan, perasaan, ataupun kekuasaan yang dimiliki individu tersebut.

2. Kapasitas (*capacity*): kapasitas yang dimaksud berkaitan dengan *output* atau hasil dari sistem politik dan sejauh mana sisten politik dapat mempengaruhi keseluruhan masyarakat dan ekonominya. Kapasitas juga berkaitan erat dengan kinerja pemerintah dan kondisi yang mempengaruhi kinerja pemerintahan tersebut. Kapasitas meliputi ruang lingkup dan skala kinerja poltik dan pemerintahan. Kapasitas berarti efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik yang berhubungan dengan rasionalitas dalam administrasi dan orientasi sekuler terhadap kebijakan. Tindakan pemerintah dipandu oleh pertimbangan dan pembenaran yang dilakukan dengan cara yang sistematis.
3. Diferensiasi (*differentiation*): diferensiasi adalah kegiatan spesialisasi yang dilakukan oleh suatu lembaga sehingga memiliki fungsi khusus dalam mengatur aturan yang ada baik mengenai hak maupun kewajiban. Diferensiasi ini idealnya dilakukan berdasarkan atas rasa integrasi yang tinggi.

Namun tidak dipungkiri untuk menciptakan ketiganya dapat bekerja secara bersamaan adalah hal yang sulit, sebab sifat satu dengan yang lainnya dapat berpengaruh negatif pada sifat lainnya. Secara historis kecenderungan ini biasanya terjadi pada ketegangan akut antara tuntutan akan kesetaraan (*equality*), persyaratan kapasitas (*capacity*), dan proses diferensiasi yang lebih besar (*differentiation*).

Tekanan untuk kesetaraan yang lebih besar dapat menantang kapasitas sistem, sedangkan diferensiasi dapat mengurangi kesetaraan dengan menekankan pentingnya kualitas dan pengetahuan khusus (Pye, *Aspects of Political Development: The Concept of Political Development*, 1966).

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, permasalahan ekonomi di Zimbabwe pasca masuknya pengaruh IMF melalui *Structural Adjustment Programmes* pada tahun 1991, dibarengi dengan keadaan politik dalam negeri Zimbabwe pada masa itu, kemudian penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implikasi penerapan SAPs dari IMF terhadap fungsi negara dalam pembangunan ekonomi di Zimbabwe pada tahun 1991-2015?

C. Landasan Teori

1. Teori Kekuasaan Struktural

Kekuasaan struktural adalah kekuasaan untuk membentuk dan menentukan struktur ekonomi politik global. Dimana pada prakteknya, negara dan berbagai aktor didalamnya seperti institusi politik, perusahaan ekonomi, para pakar profesional dan ilmuwan wajib ikut dalam menjalankan kekuasaan struktural tersebut.

Kekuasaan struktural juga merupakan kekuasaan yang digunakan untuk mengatur agenda perundingan atau bisa juga untuk merancang suatu rezim internasional (Strange, 1989 : 24-25).

Adapun 4 sumber kekuasaan struktural menurut Susan Strange antara lain:

a. Struktur Keamanan

Struktur keamanan dalam ekonomi politik adalah kerangka kekuasaan yang diciptakan oleh penyediaan keamanan oleh beberapa manusia untuk manusia lainnya. Penyedia keamanan akan mendapatkan kekuatan tertentu untuk menentukan dan bahkan membatasi berbagai kebijakan. Dengan menggunakan kekuatan ini, penyedia keamanan dapat secara tidak langsung mencapai keunggulan khusus dalam produksi, atau konsumsi kekayaan dan hak khusus dalam hubungan sosial (Strange, 1989 : 24-25).

b. Struktur Produksi

Struktur produksi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan yang menentukan apa yang diproduksi, oleh siapa dan untuk siapa, melalui metode dan pada masa apa. Struktur produksi adalah tentang orang-orang yang bekerja secara terorganisir tentang apa yang mereka produksi. Struktur produksi dapat menciptakan

kekayaan dalam ekonomi politik. Produksi telah menjadi dasar ekonomi politik internasional (Strange, 1989 : 62).

c. Struktur Finansil

Struktur finansil dapat didefinisikan sebagai keseluruhan rencana yang mengatur ketersediaan kredit sekaligus faktor-faktor yang menentukan persyaratan mata uang yang dipertukarkan satu sama lain. Dengan memiliki struktur keuangan, suatu negara dimungkinkan untuk membuat pinjaman. Struktur keuangan akan melatih daya beli yang kemudian nantinya mempengaruhi pasar untuk melakukan produksi, pengelolaan nilai tukar mata uang, sehingga mempengaruhi kurs melalui hutang dalam mata uang lainnya (Strange, 1989 : 88).

d. Struktur Ilmu Pengetahuan

Struktur ilmu pengetahuan yakni struktur yang menentukan ilmu pengetahuan apa yang ditemukan, dan bagaimana ilmu itu disimpan (Strange, 1989 : 117).

Argumen dari Susan Strange terkait teori kekuasaan struktural diatas sangat relevan untuk digunakan penulis sebagai alat analisa dampak hubungan IMF terhadap Zimbabwe, terutama implikasi SAPs dari IMF terhadap ekonomi politik Zimbabwe khususnya pada struktur produksi dan struktur finansil dalam negeri.

Pertama, kebijakan yang tertuang dalam SAPs di Zimbabwe seluruhnya merefleksikan ideologi neo-liberal. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana pinjaman, maka diberlakukanlah SAPs sebagai bentuk kontrol IMF terhadap Zimbabwe. Kebijakan tersebut yakni berupa diwajibkannya Zimbabwe meliberalisasi sistem perdagangan, sehingga negara lebih bersifat *market oriented* dan mampu melakukan produksi secara maksimal.

Program SAPs IMF di Zimbabwe yang meliputi struktur produksi antara lain sebagai berikut (Group, 1997 : 9).

- a. Program peningkatan GDP
- b. Program peningkatan jumlah ekspor
- c. Program peningkatan pertumbuhan agrikultur
- d. Program peningkatan lapangan kerja
- e. Liberalisasi perdagangan (penghapusan pembatasan impor dan ekspor).

Kedua, demi memperlancar kegiatan produksi di Zimbabwe, IMF melalui SAPs juga turut andil dalam mengatur jalannya sistem ekonomi politik di negara tersebut. Kegiatan liberalisasi oleh IMF dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi ekonomi politik. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membuat kebijakan-kebijakan fiskal yang nantinya mendorong agar kegiatan

produksi tidak mengalami hambatan apapun baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Program SAPs IMF di Zimbabwe yang meliputi struktur finansial antara lain sebagai berikut (Greenberg, 1983 : 90):

- a. Program penyeimbangan pengeluaran belanja negara sehingga tidak *overspending*
- b. Pemotongan anggaran belanja pemerintah
- c. Devaluasi mata uang, dan program peningkatan stabilitas investasi dengan cara membuka peluang investasi modal asing dan membuka saham bagi perusahaan negara.

2. Konsep Negara Gagal

Menurut Francis Fukuyama, negara yang berada dibawah suatu hukum internasional, atau dibawah suatu pemerintahan *non-state* seperti organisasi internasional, dapat pula dikategorikan sebagai negara gagal, selain dari faktor-faktor kegagalan internal berupa tidak adanya demokrasi, pluralisme atau partisipasi politik rakyat yang bermakna, dan kemunduran ekonomi. Sebab aktor-aktor tersebut baik hukum internasional maupun pemerintahan *non-state* memiliki kontrol kuat terhadap sebagian besar wilayah negara yang dibawahinya hingga pada titik terparah suatu negara kehilangan kedaulatan dan fungsi pemerintahannya berpindah (Carcano, 2015 : 154).

Pada tahun 1991 Zimbabwe secara resmi mengadakan hubungan kerjasama dengan IMF. Hubungan kerjasama tersebut dilatarbelakangi oleh niat pemerintah Zimbabwe pada masa itu untuk melakukan loncatan ekonomi dengan sokongan bantuan dana dari IMF. Namun selain menerima bantuan berupa uang, IMF juga mewajibkan Zimbabwe untuk menerapkan SAPs dinegaranya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Zimbabwe. Program-program SAPs seluruhnya menuntut Zimbabwe untuk meliberalisasi sistem ekonomi politiknya. Sebagai contoh: privatisasi, deregulasi, dan penghilangan campur tangan pemerintah terhadap kegiatan pasar. Namun sayangnya kebijakan yang diberikan IMF justru menghilangkan kedaulatannya dan fungsi negara di Zimbabwe. Sebab IMF memiliki kedudukan tinggi dan berpengaruh di negara tersebut.

D. Hipotesa

Implikasi penerapan SAPs dari IMF terhadap kegagalan fungsi negara dalam pembangunan ekonomi di Zimbabwe (1991 -2015) antara lain sebagai berikut:

1. SAPs berpengaruh pada struktur produksi dan finansial yang selanjutnya berakibat pada kemerosotan ekonomi Zimbabwe.
2. SAPs berpengaruh terhadap dinamika politik dalam negeri Zimbabwe, yang kemudian dibarengi dengan munculnya fenomena negara gagal di Zimbabwe.

E. Metode Penelitian

a. Unit Analisa

Melihat dari objek penelitian yang di analisa oleh penulis, maka Unit Analisa dari penelitian ini berupa Negara yaitu Zimbabwe.

b. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *kualitatif* (deskriptif), dengan tujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan dan gambaran secara sistematis dan akurat terkait fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang dianalisa. Sedangkan, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang tersusun dalam bentuk tidak langsung. Seperti halnya dokumen ataupun literatur yang relevan terkait dengan rumusan masalah yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan yang sumbernya berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian, berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, laporan media, serta artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

d. Cara Analisis

Cara analisis untuk menganalisa penelitian ini, penulis melihat dari sisi tujuan penelitian yang bersifat eksplanatif (menjelaskan) dimana

mengaitkan hubungan objek penelitian dilihat dari pendekatan sejarah berdasarkan kesinambungan waktu dari masa lalu hingga masa sekarang.

F. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan sebagai langkah untuk menghindari luasnya pembahasan atas objek yang diteliti serta memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik. Penelitian akan dibatasi pada implikasi SAPs terhadap kegagalan negara dalam pembangunan ekonomi di Zimbabwe dari tahun 1991 sampai tahun 2015.

G. Sistematika Penulisan

- Bab I** Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teoritis, Hipotesa, Metode Penelitian, Batasan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II** Dalam bab ini, penulis akan membahas SAPs sebagai instrumen pembangunan ekonomi di negara dunia ketiga.
- Bab III** Dalam bab ini penulis akan membahas tentang masuknya pengaruh IMF di Zimbabwe.
- Bab IV** Bab ini berisi penjelasan tentang kegagalan fungsi negara dalam pembangunan ekonomi Zimbabwe.

Bab V Pada bab ini berisi Penutup/Kesimpulan, yang berisi ringkasan secara keseluruhan tentang penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah.